



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

Alamat : Jl. AW. SUMARMO NO. 46 B Telp. (0281) 894896
PURBALINGGA 53319

**RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN ANGGARAN 2022**

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PURBALINGGA

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah kepada segenap aparaturnya DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga, sehingga dapat menyusun ulang dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022.

Renja Tahun 2022 DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga merupakan dokumen perencanaan umum program pembangunan untuk kurun waktu satu tahun kedepan diseluruh wilayah Kabupaten Purbalingga yang penyusunannya berdasarkan/mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 Kabupaten Purbalingga dan Renstra DINRUMKIM tahun 2021-2026 ini berisi uraian gambaran umum hasil evaluasi dan capaian Renja satu tahun sebelumnya permasalahan dan kondisi aktual yang dihadapi, tujuan, sasaran, strategi kebijaksanaan yang diambil, serta program – program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun ke depan pembangunan bidang perumahan dan permukiman.

Dokumen Renja 2022 DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu jajaran DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga dengan rasa terbuka menerima saran, kritik yang membangun demi penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Semoga dokumen Renja Tahun 2022 DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga ini dapat membantu dan menjadi acuan jajaran aparaturnya DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan kegiatannya dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Purbalingga,

2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PURBALINGGA


Drs. **IMAM HADI, MSi**
NIP.19650104 198607 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Landasan Penyusunan Rencana Kerja.....	2
3. Sistematika Penulisan.....	3
II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	5
1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	5
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	9
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Dae.....	11
rah	
4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	12
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	13
III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	14
1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional	14
2. Tujuan dan Sasaran	14
3. Strategi dan Kebijakan.....	17
IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	21
V. PENUTUP	32
LAMPIRAN	

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) pada Dinas Perumahan dan Permukiman (DINRUMKIM) sebagai bagian integral dari pembangunan bidang – bidang lainnya di Kabupaten Purbalingga dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkesinambungan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maju, mandiri, berdaya saing dan berakhlak mulia.

Penyusunan RENJA 2022 sebagai dasar rencana kerja dan kegiatan pada tahun 2022 mempertimbangkan segenap kekuatan dan peluang serta kelemahan yang ada pada DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga, dengan mengacu pada Visi Kabupaten Purbalingga yaitu **PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA**, sedangkan Misi yang terkait dengan OPD DINRUMKIM yaitu :

Misi 1 yaitu, *Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat.*

Misi 3 yaitu, *Mengupayakan Ketercukupan Kebutuhan Pokok Manusia Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak.*

Misi 7 yaitu, *Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.*

Sedangkan turunannya ke Visi dan Misi SKPD DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga adalah :

a. VISI

Visi DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga dalam mendukung program pembangunan pemerintah kabupaten, yaitu :

**TERWUJUDNYA SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN
BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG MANTAP
DAN TERPERCAYA**

b. MISI

RENJA Tahun 2022 DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga telah menetapkan misi untuk mewujudkan VISI DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga, sebagai berikut :

- b1. Mewujudkan pelaksanaan tugas DINRUMKIM yang profesional, efisien, efektif dan akuntabel, transparan, aspiratif, serta berkelanjutan dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
- b2. Mewujudkan kondisi sarana dan prasarana pelayanan lingkungan perumahan maupun pemukiman yang aman, mantap dan layak sesuai dengan tata ruang dan tata bangunan yang serasi, tertib, sehat dan aman di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan.
- b3. Mewujudkan ketersediaan air bersih sanitasi lingkungan bagi masyarakat.
- b4. Mewujudkan fasilitasi penyelenggaraan, pengadaan, pengembangan dan pengendalian pengelolaan pemanfaatan tanah milik Pemkab dan masyarakat sesuai dengan rencana tata ruang.

2. Landasan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

Landasan penyusunan RENJA 2022 adalah :

- a) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008;
 - e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 - f) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 1 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga ;
 - g) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga ;
 - h) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga (RPJMD) 2021- 2026;
 - i) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Sistematika Penulisan

RENJA 2022 ini disusun dengan sistematika:

I. PENDAHULUAN.

- a. Latar Belakang
- b. Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja
- c. Maksud dan Tujuan
- d. Sistematika Penulisan

II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- b. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- c. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- d. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

e. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

a. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

b. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

c. Program dan Kegiatan

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

V. PENUTUP

II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN YANG LALU

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Perda Kabupaten Purbalingga nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, yang sebagian tugas pokok fungsinya merupakan bagian integral dalam penyelenggaraan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Pencapaian Kinerja kegiatan Tahun Anggaran 2020 sebagai tahun keempa dari tahun 2017 OPD Dinas perumahan dan Permukiman melaksanakan tugas dan fungsinya melalui program dan kegiatan sebagaimana yang ada dalam Dokumen APBD 2020 dapat diuraikan secara garis besar sebagaimana pada tabel berikut :

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2020
KABUPATEN PURBALINGGA**

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	Urusan/Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Program & Renstra OPD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun ke (n-3)	Target dan Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan tahun yang lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan tahun n-1	Perkiraan Realisasi Renstra s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Tahun yang Lalu	Realisasi Renja Tahun yang lalu	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi program dan kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10(5+7+9)	11(10/4)
	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	72	56,97	11,54	7,98	69,15	7,21	72,16	100,22
		Persentase rumah layak huni	96,5	95,21	95,5	96,09	100,62	96,5	96,5	100,00
	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	Persentase layanan sanitasi	88	90,77	86,5	92,26	106,66	88	93	105,68
		Persentase layanan air bersih	93	91,01	92	92,05	100,05	93	93,5	100,54

		Luasan kawasan tidak kumuh	1442	1442	1442	1442	100,00	1442	1442	100,00
	Program Pengelolaan Pertanahan (Dayur Tertib Pertanahan)	Persentase bidang tanah Pemda bersertifikat	64,01	64,98	63,97	67,72	105,86	64,01	70	109,36
		Persentase luas tanah Pemda yang dimanfaatkan	80,15	80,09	80	80,10	100,13	80,10	80,10	99,94

- a. Capaian kinerja sasaran Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat dengan indikator kinerja Persentase rumah layak huni, bahwa pada tahun 2019 capaian kinerjanya tercapai 95,21 % sehingga persentase jumlah RTLH menjadi 4,79 %. Sedangkan pada tahun 2020 dengan target 95,5% tercapai 96,09 %. Pencapaian ini dari realisasi jumlah rumah tidak layak huni yang direhab mencapai 3.883 rumah dengan perincian 2.197 rumah kontribusi dari kegiatan rehab RTLH yang didanai dari APBD Propinsi sejumlah 318, dana DAK 126, dana BSPS 705, Dana Desa 1.048 rumah.
- b. Capaian kinerja sasaran Terwujudnya lingkungan permukiman yang berkualitas dengan indikator kinerja :
 - * Persentase luasan kawasan tidak kumuh, dapat dijelaskan bahwa tahun 2018 telah ditangani luasan kawasan kumuh 4,42 ha, yang merupakan sisa total luasan kumuh, sehingga pada akhir 2018 sudah tidak ada lagi luasan kumuh. Pada tahun 2020 anggaran penanganan kawasan kumuh dialihkan dalam rangka mendukung penanganan Covid 19. Hal ini tidak mempengaruhi target capaian Renstra karena indikator kinerja cakupan luasan kawasan tidak kumuh pada tahun 2020 capaian kinerjanya sudah 100 % (32,39 Ha sudah tertangani tahun 2019).
 - * Persentase rumah tangga mengakses air bersih tahun 2019 capaian kinerjanya sebesar 90,01 %, sedangkan pada tahun 2020 dengan target 92 % dapat dicapai sebesar 92,05 %. Capaian ini diperoleh dari pelaksanaan fasilitasi kegiatan Pamsimas, fasilitasi kegiatan HAMP, HID, dari dana DAK dengan bentuk pekerjaannya yaitu pembangunan sistem air minum dan pembangunan jaringan air minum dari dana Ban Gub.

- * Indikator kinerja meningkatnya cakupan penanganan prasarana sanitasi pada tahun 2019 capaian kerjanya adalah 90,77 %. Pada tahun 2020 dengan target Rentstra sebesar 87 % dicapai sebesar 92,26
Capaian tersebut merupakan kontribusi jambanisasi yang dikelola OPD karena sampai dengan tahun anggaran 2020 .OPD Dinrumkim baru mendapat alokasi anggaran untuk penanganan prasarana sanitasi pembangunan IPAL skala individual untuk 3 desa saja..
- c. Capaian kinerja sasaran meningkatnya kapasitas status dan pemanfaatan tanah dengan indikator kinerja :
 - Persentase Tanah milik Pemda bersertifikat dapat diuraikan bahwa pada tahun 2019 capaian bidang tanah Pemda yang bersertifikat menjadi 64,98 %. Pada tahun 2020 tanah Pemda yang berhasil disertifikat sebanyak 37, sehingga tanah Pemda yang bersertifikat mencapai 67,72 %
 - Persentase tanah Pemda yang dimanfaatkan, pada tahun 2019 tanah Pemda yang dimanfaatkan mencapai 80,09 %. Sedangkan pada tahun 2020 capaian kerjanya mencapai 80,10 %

2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja perangkat daerah dapat disajikan dalam tabel berikut :

**TABEL : PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PURBALINGGA**

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	IPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	SPM	IKK	53,82	64,79	70	72	56,97	64,95	70	72	Kondisi Covid
	Persentase rumah layak huni		IKK	94	95,5	97	98	95,21	96,09	97	98	
	Persentase layanan sanitasi		IKK	86,5	87	92,5	93	90,77	92,26	92	93	
	Persentase layanan air bersih		IKK	91	92	93,5	94,5	91,01	92,05	93,5	94,5	
	Luasan kawasan tidak kumuh		IKK	1442	1442	1442	1442	1442	1442	1442	1442	
	Persentase bidang tanah Pemda bersertifikat		IKK	63,93	63,97	70	72	64,98	67,72	70	72	
	Persentase luas tanah Pemda yang dimanfaatkan		IKK	79,9	80	80,10	80,15	80,09	80,10	80,10	80,10	

Dari tabel tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa seluruh indikator kinerja sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan, demikian juga realisasi pada tahun 2020, walaupun peningkatannya tidak besar.

Peningkatan capaian kinerja berbanding lurus dengan ketersediaan dana yang dianggarkan setiap tahunnya, termasuk yang dikucurkan dari pemerintah pusat, melalui DAK air minum dan sanitasi, dana BSPS dan DAK perumahan untuk rehab rumah tidak layak huni, serta dana dari propinsi untuk pemugaran/rebah rumah tidak layak huni.

Sehubungan hal tersebut, diharapkan setiap tahunnya dapat dikucurkan dana dari pemerintah propinsi dan pusat.

3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Prioritas pembangunan dalam lingkup Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga mengacu pada isu strategis dalam perencanaan pembangunan tahun 2021 yaitu :

- Masih adanya masyarakat yang membutuhkan perhatian dalam rangka memenuhi ketersediaan rumah yang layak huni, sehingga masih diperlukan adanya kepedulian pemerintah daerah guna mewujudkan peningkatan kualitas perumahan bagi masyarakat miskin melalui fasilitasi kegiatan untuk mengurangi rumah tidak layak huni. Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya ternyata masih adanya RTLH yang belum masuk dalam database pemugaran RTLH.
- Masih adanya rumah tangga yang belum terakses air minum/air bersih dan sistem sanitasi.
- Masih adanya sebagian kawasan potensi kumuh di perkotaan. Berdasarkan kondisi tersebut maka masih perlu adanya program/kegiatan yang mendukung pada peningkatan penyediaan

prasarana permukiman untuk meningkatkan kesehatan lingkungan permukiman dan mengurangi permukiman kumuh.

Dari sisi anggaran hasil pelaksanaan anggaran tahun yang lalu masih kurangnya dukungan anggaran guna mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga untuk tahun berikutnya perlu adanya akselerasi dukungan anggaran guna mencapai target.

Dengan adanya program pemerintah Pusat dan Propinsi serta lembaga-lembaga lain termasuk CSR dari perusahaan adalah merupakan peluang yang baik guna mendukung pencapaian menurunkan rumah tidak layak huni (RTLH)

4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Program / kegiatan yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah pada umumnya sudah terakomodir di dalam RKPD. Hanya besaran anggarannya yang kadangkala tidak sesuai dengan usulan awal karena adanya kebijakan pengalihan prioritas alokasi anggaran untuk kegiatan lainnya yang lebih mendesak atau lebih prioritas.

Disisi lain target capaian kinerja tidak dirubah dan atau tidak ada dukungan anggaran dan kegiatan untuk mencapai/memenuhi target kinerja, sehingga bisa mengakibatkan pada akhir tahun anggaran/pelaksanaan Renja target tidak tercapai.

Hal lain yang kadang terjadi adalah munculnya suatu kegiatan yang tidak diusulkan OPD, namun masih masuk dalam lingkup OPD, sehingga untuk jenis kegiatan yang sifatnya teknis diperlukan koordinasi yang simultan dengan pihak-pihak terkait, khususnya dalam penyusunan perencanaan teknis dan kondisi faktual di lapangan.

Terkait dengan adanya ketentuan baru dalam penyusunan perencanaan pada Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2020, maka perlu adanya sinkronisasi pogram/kegiatan tahun sebelumnya yang sudah baku mengalami perubahan total, sehingga ada sebagian program.kegiatan

yang tidak/belum bisa tertampung pada urusan/program dan kegiatan sesuai yang ada dalam nomenklatur Permendagri nomor 90 tahun 2020.

5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dalam penyusunan Renja Perangkat daerah adalah diperoleh melalui hasil kajian internal masing-masing Bidang yang dikaitkan dengan kesesuaian tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang melekat dan disinkronkan dengan dokumen RPJMD, program nasional dan propinsi.

Disisi lain juga menyerap aspirasi masyarakat yang diusulkan melalui mekanisme Musrenbang secara berjenjang. Usulan ini selanjutnya disesuaikan dengan acuan yang ada di RPJMD dan kesesuaian dengan program pemerintah Pusat, Propinsi dan ketersediaan dana yang ada serta mempertimbangkan dari tingkatan prioritas pada skala kabupaten.

III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. TUJUAN, SASARAN

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD Dinrumkim antara lain adalah urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dimana kewenangannya yaitu dalam hal relokasi/penyediaan perumahan bagi korban bencana dan atau akibat program pemerintah, perbaikan kondisi kawasan permukiman, pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Kinerja pembangunannya dapat dilihat dari indikator luasan kawasan kumuh, persentase rumah tidak layak huni, persentase rumah tangga bersanitasi, persentase rumah tangga menggunakan air bersih.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pada Rencana Kerja Tahun 2022 DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga mengacu pada RPJMD Kabupaten Purbalingga 2021–2026 adalah :

- a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kualitas pelayanan publik;
- b. Meningkatnya akses air;
- c. Meningkatnya akses sanitasi;
- d. Meningkatnya penanganan kawasan kumuh dan perbaikan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman; dan
- e. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan tanah untuk pembangunan.

Sedangkan penjabaran tujuan tersebut per Bidang / Sekretariat adalah sebagai berikut :

* **Sekretariat :**

- Meningkatnya motivasi, etos kerja dan profesionalisme aparatur serta sarana dan prasarana operasional;
- Terwujudnya tertib administrasi perencanaan program dan pelaporan;
- Meningkatnya pelayanan dan pemasukan sumber-sumber pendapatan daerah dari SKPD/OPD.

* **Bidang Perumahan:**

- Meningkatnya sarana-prasarana perumahan yang sehat dan memadai bagi masyarakat;
- Meningkatnya kualitas pengelolaan perumahan formal dan swadaya sesuai dengan tata ruang di kawasan perkotaan, pedesaan dan kawasan strategis.

* **Bidang Permukiman:**

- Meningkatnya fasilitas sarana prasarana permukiman, sanitasi dan penyehatan lingkungan;
- Menurunnya wilayah permukiman masyarakat yang rawan bencana.

* **Bidang Pertanahan:**

- Meningkatkan pengelolaan, pengadaan dan pemanfaatan tanah milik Pemkab dan masyarakat sesuai dengan rencana tata ruang;
- Meningkatnya fasilitasi pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum dari OPD terkait.

SASARAN

Saran Kinerja pada Rencana Kerja Tahun 2020 DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga mengacu pada RPJMD Kabupaten Purbalingga 2021–2026 adalah :

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan DINRUMKIM (mendukung misi 1)
2. Meningkatnya akses air minum (mendukung Misi 3)
3. Meningkatnya akses sanitasi (mendukung Misi 3)
4. Meningkatkan kawasan tidak kumuh perkotaan (mendukung misi 3).
5. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan tanah untuk pembangunan.

Sedangkan penjabaran sasaran kinerja tersebut per Bidang/Sekretariat adalah sebagai berikut: :

* **Sekretariat :**

- Meningkatkan kinerja personil yang profesional dan berdedikasi tinggi serta tersedianya jumlah SDM bidang teknis serta sarana dan prasarana operasional yang memadai;
- Meningkatkan tertib administrasi perencanaan program / kegiatan, pelaporan kinerja kegiatan dan keuangan;
- Mengoptimalkan penjangkaran pendapatan daerah dari sumber-sumber pendapatan SKPD;

* **Bidang Perumahan :**

- Mewujudkan sarana dan prasarana dasar perumahan yang sehat dan memadai;

- Meningkatkan kualitas pengelolaan perumahan formal dan swadaya sesuai dengan tata ruang di kawasan perkotaan, pedesaan dan kawasan strategis.
- * **Bidang Permukiman:**
 - Mewujudkan tersedianya fasilitas sarana prasarana permukiman, sanitasi dan penyehatan lingkungan bagi masyarakat;
 - Menurunkan wilayah permukiman masyarakat yang rawan bencana.
- * **Bidang Pertanahan:**
 - Meningkatkan pengelolaan, pengadaan dan pemanfaatan tanah milik Pemkab dan masyarakat sesuai dengan rencana tata ruang;
 - Meningkatkan fasilitasi pengadaaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum dari OPD terkait.

3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja tahun 2022 adalah untuk melanjutkan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan yang akan berisi program dan kegiatan sebagai berikut :

3.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- *Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- *Administrasi Umum Perangkat Daerah
- *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

3.2. Program Pengembangan Perumahan

Kegiatan :

- * Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- * Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
- * Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- * Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota
- * Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus
- * Penerbitan Ijin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
- * Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan

3.3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU)

Kegiatan :

- Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

3.4. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kegiatan :

- Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil

3.5. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Kegiatan :

- Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada daerah Kabupaten/Kota

3.6. Program Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Kegiatan :

- Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

3.7. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kegiatan :

Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Program ini merupakan urusan pemerintahan bidang Pertanahan

Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Tingkat Kemampuan Kecil

3.8. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini merupakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum

Kegiatan :

Pembangunan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten / Kota

3.9. Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah

Program ini merupakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum

Kegiatan :

Pembangunan/ Penyediaan Sistem Air Limbah domestik dalam daerah Kabupaten / Kota

3.10. Program Pengolahan Perasampahan

Program ini merupakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum

Kegiatan :

Pengembangan Sistem dan Pengolahan Perasampahan di Daerah Kabupaten/Kota

3.11. Program Penyelesaian sengketa Tanah Garapan

Program ini merupakan urusan pemerintahan bidang Pertanahan

Kegiatan :

*Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten / Kota

3.12. Program Penatagunaan Tanah

Program ini merupakan urusan pemerintahan bidang Pertanahan

Kegiatan :

- Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota

3.13. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

Program ini merupakan urusan pemerintahan bidang Pertanahan

Kegiatan :

- Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut di atas, DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga telah menyiapkan program dan kegiatan sebagai Rencana Kerja dan pendanaan pada tahun 2022, dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**RENCANA PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DINRUMKIM
KABUPATEN PURBALINGGA**

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	DAK	TAHUN ANGGARAN 2022				RENCANA MAJU TAHUN ANGGARAN 2023			Catatan Penting
				LOKASI	Target Capaian Kinerja	ANGGARAN (RP)	Sumber Dana	LOKASI	Target Capaian Kinerja	ANGGARAN (RP)	
1	Pendapatan					775.000.000				750.000.000	
2	Belanja					20.587.426.000				87.489.343.500	
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran OPD		SEKRETARIAT	100%	3.304.146.000	DAU	SEKRETARIAT	100%	3.304.146.000	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesiediaan Laporan Capaian Kinerja			100%	11.000.000			100%	11.825.000	
	1 Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					6.000.000				6.825.000	
	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5.000.000				5.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang Ditindaklanjuti			100%	3.105.688.000			100%	3.003.722.000	
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.886.712.000				2.913.112.000	
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					64.310.000				70.600.000	
	3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					154.666.000				20.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan				55.800.000				62.000.000	

1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				55.800.000			62.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Layanan Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	73.877.000		100%	719.685.000
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.050.000			2.050.000
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				45.862.000			50.587.000
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.400.000			2.400.000
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				14.925.000			16.500.000
5	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				8.640.000			9.600.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah		100%	620.991.000		100%	623.548.000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.125.000			1.125.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				23.366.000			25.923.000
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.300.000			1.300.000
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				595.200.000			595.200.000

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100%	121.708.000			100%	126.433.000	
	1 Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				115.183.000				119.908.000	
	2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.525.000				6.525.000	
B	Program Penyelesaian sengketa Tanah Garapan	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	PERTANAHAN	100%	4.500.000	DAU	PERTANAHAN	100%	5.000.000	
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten	Persentase sengketa tanah yang difasilitasi		100%	4.500.000			100%	5.000.000	
	1 Mediasi Penyelesaian sengketa Tanah Garapan dalam satu Daerah Kabupaten		Kab. Pbg		4.500.000				5.000.000	
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah /Kota	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan		100%	278.250.000	DAU		100%	500.000.000	
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembebasan Tanah yang Diselesaikan		100%	278.250.000			100%	500.000.000	
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Pbg		278.250.000				500.000.000	

	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Tanah Pemda		100%	81.125.000	DAU		100%	89.000.000	
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas tanah Pemda yang dimanfaatkan		100%	81.125.000			100%	89.000.000	
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota		Kab. Pbg		81.125.000				89.000.000	
C	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Tercapainya SPM bidang Perumahan	PERUMAHAN	100%	305.976.000	DAU	PERUMAHAN	100%	366.250.000	
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah korban bencana yang didata			20.000.000				20.000.000	
	1 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Kab. Pbg	20 Desa	10.000.000			20 Desa	25.000.000	
	2 Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		Kab. Pbg	10 Kec	0				0	
	3 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		Kab. Pbg	1 Kab	10.000.000			1 Kab	10.000.000	
	4 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana		Kab. Pbg	1 Kab	0			1 Kab	25.000.000	
	5 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Kab. Pbg	1 Kab	0			1 Kab	10.000.000	

Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Persentase rumah yang terdata			20.000.000		70.000.000
1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana		Kab. Pbg	1 Keg		-	
2	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP		Kab. Pbg	1 Keg	10.000.000	-	15.000.000
3	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator		Kab. Pbg	1 Keg	10.000.000		10.000.000
4	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana		Kab. Pbg	1 Keg	0		25.000.000
5	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan		Kab. Pbg	1 Keg	0		10.000.000
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Persentase jumlah rumah yang terbangun/terehab			244.726.000	-	244.726.000
1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana		Kab. Pbg	50 rumah	244.726.000	-	244.726.000
2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota		Kab. Pbg	1 Keg	0		40.625.000

3	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		Kab. Pbg	50 rumah	0		1.250.000.000
4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		Kab. Pbg	25 rumah	0		875.000.000
5	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/ Kota		Kab. Pbg	1 Keg	0		200.000.000
Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota		Persentase rumah yang diserahkan			0		500.000.000
1	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Kab. Pbg	50 rumah	0		500.000.000
2	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Kab. Pbg	50 rumah	0		12.500.000
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus		Persentase meng huni Rusun yang terbina			0		348.000.000
1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun		Kab. Pbg	1 Tower	0		298.000.000
2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		Kab. Pbg	1 Tower	0		50.000.000

Penerbitan Ijin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Persentase pengajuan yang direkomendasi			21.250.000			40.000.000		
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Ijin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik			Kab. Pbg	10 Perumahan	0	-	25.000.000		
2	Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pembangunan Perumahan			Kab. Pbg	10 Perumahan	21.250.000	-	15.000.000		
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum			Kab. Pbg	1 Keg	0	-	25.000.000		
Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)		Persentase rekomendasi sertifikat yang diterbitkan				0	-	25.000.000		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)					0	-	25.000.000		
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU)		Cakupan Lingkungan Perumahan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU		Kab. Pbg	77,36%	2.244.850.000	DAU	Kab. Pbg	79,25%	1.633.600.000
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Jumlah PSU yang Ditangani			12 Lokasi	2.244.850.000		12 Lokasi	1.633.600.000	
1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan					0		0		
2	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian					2.231.250.000		1.620.000.000		

	3	Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan				13.600.000					13.600.000
		Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Fasilitasi Permohonan yang Tepat Waktu	Kab. Pbg		0	DAU	Kab. Pbg	100%		15.000.000
		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Persentase Jumlah Unit Perumahan yang Difasilitasi			0					15.000.000
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil				0					15.000.000
D		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	PERMUKIMAN		0	DAK	PERMUKIMAN	97,71%		3.000.000.000
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani			0			2.000 rumah		3.000.000.000
	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 hektar				0					3.000.000.000

	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang tertangani	Kab. Pbg	12,44%	424.250.000	DAU	Kab. Pbg	24,88%	921.250.000	Gayeng
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di Bawah 10 (sepuluh) ha	Luas Kawasan Kumuh yang ditangani		12,44%	424.250.000			24,88%	921.250.000	
	1 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				0			0		
	2 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU				424.250.000			921.250.000		
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Persentase Tambahan Rumah Tangga yang mendapat Akses Air Minum Tahun n	Kab. Pbg	1,85%	9.471.036.000	DAK/DAU	Kab. Pbg	1,39%	12.513.446.000	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Bertambahnya jumlah rumah tangga yang memperoleh akses kebutuhan air minum		1,85%	9.471.036.000	DAK/DAU		1,39%	12.513.446.000	
	1 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan				1.959.200.000	DAK		5.001.630.000		
	2 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan				7.511.836.000	DAU		7.511.836.000		
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	Persentase Tambahan Rumah Tangga yang Mendapat Akses Sanitasi Tahun n	Kab. Pbg	1,44%	1.968.375.000	DAK	Kab. Pbg	1,44%	3.442.932.000	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik dalam di Daerah Kabupaten/Kota	Bertambahnya Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Air Limbah Domestik		300 rumah	1.968.375.000			300 rumah	3.442.932.000	
	1 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat				1.968.375.000			3.442.932.000		

	Program Pengembangan Sistem dan Pengolahan Persampahan Regional	Persentase jumlah sampah yang dikurangi melalui TPS3R		Kab. Pbg	2,5%	1.820.000.000	DAU	Kab. Pbg	2,5%	1.820.000.000	
	Pengembangan Sistem dan Pengolahan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan Persampahan yang Terbangun			100%	1.820.000.000			100%	1.820.000.000	
	1 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		up			1.820.000.000				1.820.000.000	

V. PENUTUP

Sebagaimana telah diuraikan di depan bahwa RENJA 2022 DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga merupakan dokumen perencanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan pada Dinas Perumahan dan Permukiman yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.

Mengingat kondisi dan situasi yang berkembang serta keterbatasan kemampuan keuangan daerah, yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja.

Renja 2022 ini sifatnya masih Draf, yang masih dimungkinkan adanya perubahan baik dalam program/kegiatan maupun jumlah anggarannya, karena Penyusunan Reja 2022 ini disusun sebelum pelaksanaan tahapan usrenbang berikutnya, yaitu Tingkat Forum OPD dan Musrenbang Tingkat Kabupaten serta kegiatan sinkronisasi/penajaman setelah Musrenbang Kabupaten.

Semoga apa yang telah dituangkan dalam RENJA 2022 ini dapat membantu mewujudkan kemajuan dan perkembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purbalingga sesuai dengan skala prioritas.

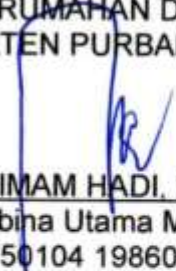
Kepada semua jajaran aparat DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga dan segenap lapisan masyarakat serta Unit Kerja / Instansi terkait yang berpartisipasi dalam mewujudkan RENJA 2022 ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya.

Terima kasih .

Purbalingga,

2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PURBALINGGA


Drs. IMAM HADI, MSi
Permbina Utama Muda
NIP. 19650104 198607 1 001